

RE-THINKING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL: STUDI KASUS TAMBANG EMAS BATU GOSOK – LABUAN BAJO – NTT

Doddy Setiawan¹; Robert T. Herman²

^{1,2} Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bina Nusantara University
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Kemanggisian, Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

This paper is a practical-theoretical study towards economic development policy. Unrealistic policy and planning approach, government management close and uncooperative system which considered intervening political interest rather than economic development are as one cause of stagnating economic development in several areas. Economic development that has been established by central government has not able to give velocity acceleration solution in economic development; it is the authority and power divergence that affecting local economic development. Economic policy through mining investment as one strategy development has been approved by district government and investors had affected long polemic. It needs further thought and study related to the policy so it could get the expected result and local economic development. This paper is purposed to give contributed thought of re-thinking policy economic development especially about gold mining investment decision in conservation area of Batu Gosok-Labuan Bajo-NTT.

Keywords: development, economy, investment, policy re-thinking

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan sebuah kajian praktis-teoritis terhadap kebijakan pembangunan ekonomi. Pendekatan kebijakan dan perencanaan yang tidak realistis, sistem manajemen pemerintahan yang tidak terbuka dan kurang kooperatif serta cenderung mementingkan kepentingan politik dibandingkan kepentingan pembangunan ekonomi itu sendiri dinilai sebagai salah satu penyebab tersendatnya pembangunan ekonomi di daerah. Kebijakan otonomi yang sudah digulirkan pemerintah pusat belum mampu memberikan solusi akselerasi percepatan pembangunan ekonomi, justru yang terjadi adalah penyimpangan wewenang dan kekuasaan yang justru berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan ekonomi melalui investasi tambang sebagai salah satu strategi pembangunan yang sudah disepakati pemerintah daerah dan investor justru menimbulkan polemik panjang. Perlu pemikiran dan kajian yang lebih jauh terkait kebijakan tersebut sehingga hasil yang diharapkan oleh semua pihak dapat tercapai dan cita-cita peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal akan segera terwujud. Melalui tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terkait re-thinking kebijakan pembangunan ekonomi khususnya yang terkait dengan keputusan investasi tambang emas di kawasan konservasi wisata Batu Gosok-Labuan Bajo-NTT.

Kata kunci: pembangunan, ekonomi, investasi, re-thinking kebijakan

PENDAHULUAN

Demokrasi ekonomi tengah menjadi sorotan publik. Signal degradasi pembangunan ekonomi semakin kuat bersamaan dengan pudarnya pemahaman atas nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi roh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai sebuah amanah UUD 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat justru terkesan lumpuh, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ini sungguh memprihatinkan yakni terjadinya krisis demokrasi. Demokrasi mengalami masa sulit seiring krisis ekonomi yang menghantam dunia yang juga berpengaruh ke dunia politik, demikian apa yang ditulis oleh Samuel Huntington mengenai masa depan demokrasi (Crozier, Huntington & Watanuki, 1975). Kemerdekaan ekonomi memang masih sangat jauh dari kenyataan, namun runtuhnya moral elit politik daerah adalah sebuah kemunduran drastis di tengah semarak arus globalisasi ekonomi dan kompetisi global yang semakin tak terbendung. Belum lagi ditambah dengan pemahamannya terhadap demokrasi yang teramat kerdil. Sesungguhnya, inilah fase kritis dimana demokrasi telah disemayamkan oleh ketidaksiapan elit politik daerah dan konyolnya adalah ia memilih ikut berkabung dalam ruang demokrasi semu yang penuh intrik dan kepalsuan.

Demokratisasi sejatinya menggerakkan pembangunan ekonomi daerah dan hal tersebut hanya bisa dilakukan sejajar dengan pembangunan demokrasi politik. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dahl (1985) ia mengatakan bahwa semestinya, prosedur demokrasi harus diperluas atau dikembangkan hingga ke aspek ekonomi. Maka konsekuensinya adalah keberhasilan dalam demokrasi akan menyokong keberhasilan ekonomi. Demokrasi ekonomi sesungguhnya mengadopsi sistem yang dianut oleh paham demokrasi dengan prinsip dasar bahwa rakyat bertanggung jawab atas negara. Sebagaimana kekuasaan diatur dengan asas dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukan bagi rakyat (Kadi, 2006), demikian pun dalam demokrasi ekonomi menegaskan bahwa rakyat adalah orang banyak, *the common people*, sehingga kepentingan rakyat adalah kepentingan orang banyak. Hal ini dipertegas melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 dimana tujuannya adalah mewujudkan cita-cita nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, strategi pembangunan juga harus disadari sebagai suatu pendekatan komprehensif dan bersifat multidimensional karena terkait dengan aspek-aspek strategis lainnya seperti dimensi sosial, politik, budaya dan struktur kelembagaan yang ada di masyarakat. Adapun faktor-faktor pendukung lainnya sebagai indikator pembangunan yakni perbaikan pada bidang pendidikan, pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai permasalahan sedang menggerogoti eksistensi elit politik daerah khususnya dalam berdemokrasi baik dalam konteks demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik dan relevansinya terhadap kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk melihat kembali strategi dan orientasi pembangunan ekonomi daerah perspektif dan memikirkan kembali apa yang seharusnya dilakukan terutama oleh Pemda Manggarai Barat terkait Kasus Tambang Emas Batu Gosok, Labuan Bajo, NTT.

PEMBAHASAN

Otonomi Daerah dan Transformasi Ekonomi

Otonomi daerah telah membuka ruang bagi terlaksananya desentralisasi ekonomi. Pemerintah daerah menjalankan peran sentral untuk mengembangkan daerahnya masing-masing melalui pemanfaatan semua sumber daya lokal. Demokratisasi tetap dijaga melalui sinergi yang tercipta antara pemerintah dan masyarakat, semua mengambil peran secara proporsional dengan semangat nilai-nilai demokrasi. Pembangunan ekonomi daerah yang desentralistik ini harus tetap berlandaskan

pada kondisi sumber daya lokal atau kondisi riil yang terjadi. Hal tersebut sangat esensial dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Penguatan fundamen ekonomi melalui pengembangan sektor riil diyakini sebagai stabilisator perekonomian nasional. Sebagai perbandingan, pengalaman krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1997 menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi ekonomi. Pada tahun 1998 dan 2004, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB semakin merosot masing-masing adalah 17.4% dan 15.4%. Sumbangan sektor pertambangan juga merosot pada kedua tahun itu yakni 8.2% dan 8.6%. Sementara itu, sektor industri justru mengalami peningkatan pesat setelah krisis dari 23.9% (1998) menjadi 28.3% (2004), sebaliknya terdapat penurunan pada sektor jasa dari 50.3% (1998) menjadi 47.7% (2004), (Hakim, Lukman et al., 2009). Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Lalu, bagaimana dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat? Kontribusi terbesar terhadap PAD (2006) adalah sektor pertanian (69.1%) meskipun kontribusinya terus menurun namun tidak terlalu signifikan. Sisanya adalah dari sektor pariwisata / jasa, perikanan dan kelautan, peternakan serta kehutanan. Sektor pertambangan sangat kecil kontribusinya, sekitar 2.25% dari total PDRB atau senilai 7.3 M (tahun 2004), (Sumber : Dinas Perhub. & Informatika Mabar)-2009.

Bappeda Kabupaten Manggarai Barat dalam rencana pembangunan yang telah dirumuskan untuk tahun 2009 nampaknya melihat potensi sektor tersier sangat produktif sehingga sektor tersebut lebih difokuskan pengembangannya dibandingkan dengan sektor primer. Hal tersebut juga menggambarkan adanya transformasi ekonomi dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang juga sejalan dengan transformasi pembangunan ekonomi nasional. Tentu saja, transformasi ekonomi diharapkan membawa perubahan bagi segenap masyarakat menuju altar keadilan dan kesejahteraan yang telah lama dicita-citakan meskipun akan selalu menimbulkan pro dan kontra.

Polemik Tambang Emas Batu Gosok

Sungguh disadari bahwa tanggung jawab dan kewajiban atas terpenuhinya hak-hak kesejahteraan rakyat, hak sosial, hak budaya dan hak-hak politik merupakan tugas pemerintah baik pusat maupun daerah. Bahwa adanya keinginan kuat Pemda Manggarai Barat untuk membangun kesejahteraan ekonomi daerah merupakan langkah progresif menjalankan amanah titipan rakyat dalam rangka terciptanya kesejahteraan rakyat. Namun amat keliru manakala menjadikan ekonomi tambang sebagai jalan tol meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi hanyalah sebuah entitas pembangunan dan tambang pun adalah bagian dari entitas ekonomi namun tidak semudah yang dibayangkan jika hendak membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pro-kontra keberadaan tambang emas Batu Gosok di wilayah Kab. Manggarai Barat, NTT justru memperlihatkan terjadinya polemik multikepentingan yang hakekatnya adalah pencarian jawaban atas hilangnya spirit dan moral pembangunan ekonomi rakyat. Pemerintah *incumbent* secara terpaksa menyingkirkan demokrasi dengan asas-asas yang terkandung di dalamnya, dan dengan mudahnya mengeluarkan keputusan ijin penggalian tambang (Kep. Bupati Manggarai Barat No. DPELH.540/273/VII/2008). Ada kesan yang sangat jelas bahwa bupati Manggarai Barat sengaja menutup-nutupi rencana eksplorasi tambang emas Batu Gosok karena melihat sesuatu yang silau yang ditawarkan pemodal untuk kepentingan pribadi. Inilah sikap arogansi yang sangat fatal dengan mencoba menutup rapat ruang untuk berdemokrasi dan inilah indikasi terjadinya krisis demokrasi.

Sikap *semau gue* ala bupati Manggarai Barat, Fidelis Pranda yang dengan sepihak memutuskan ijin penambangan emas Batu Gosok cukup mempertegas situasi bahwa beliau sebenarnya berada di balik paham neoliberal. Ini bukan semata persoalan ideologi ekonomi apa yang dianut melainkan sebuah fakta lahirnya otoritarianisme, eksploitasi, ketidaksetaraan dan perusakan lingkungan (Klein, 2007). Eksistensi potensi ekonomi rakyat dimandulkan dari keberadaannya yang

secara de facto hal tersebut merupakan sumber daya yang sangat handal. Itu sebagai konsekuensi atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Manggarai Barat (bupati) yang tidak mengedepankan kekuatan ekonomi rakyat sebagai sendi utama pembangunan ekonomi.

Beralih ke persoalan tambang, seandainya bahwa tambang emas Batu Gosok adalah proyek kesejahteraan ekonomi rakyat maka pemerintah harus jelas dan transparan menyampaikan kepada publik mengenai hal-hal seperti berapa besar kontribusi tambang tersebut terhadap PAD? Adakah pengorbanan dan seberapa besar pengorbanan yang harus diberikan rakyat atas pelaksanaan proyek tersebut? Bagaimana pemerintah menjelaskan tercapainya kesejahteraan ekonomi rakyat sebagai dampak eksplorasi dan eksploitasi tambang? Lalu, bagaimana perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, pariwisata, kelautan dan ikan, hutan, jasa dan transportasi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat?

Segudang pertanyaan dan protes serta bantahan dan alibi akan terus bermain dalam angan dan pikiran masyarakat, entah sampai kapan. Pemerintah seharusnya tidak bermain teka-teki dan membiarkan masyarakat membangun opini yang justru berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Atau, jangan-jangan ketidakterlibatan elemen masyarakat dalam pengambilan kebijakan ekonomi tambang dan mungkin kebijakan lainnya karena sudah terlanjur dianggap bodoh oleh pemimpinnya sendiri.

Pembelajaran untuk Sang Aktor

Aktor utama di balik semua kebijakan eksplorasi tambang adalah Pemda Manggarai Barat. Desakan menolak tambang dengan mengedepankan berbagai bentuk fakta yang selama ini dikumpulkan serta hasil evaluasi dan analisa risiko / dampak aktivitas penambangan adalah sebuah pembelajaran yang dialamatkan kepada pemerintah daerah bahwa kesejahteraan rakyat hanya dapat tercapai dan ditingkatkan serta dikelola oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan semua potensi yang dimilikinya. Kegeraman terhadap pemerintah sama sekali bukanlah pengadilan atas nama rakyat yang sedang tertindas melainkan keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi hanya akan dapat tercipta jika keadilan didahulukan, dan kesejahteraan itu tidak bisa diciptakan secara instan.

Pro kontra yang terlanjur panas muncul di permukaan harus dicermati secara, bijak dan elegan; jauh dari risiko konflik horisontal dan vertikal yang pada akhirnya memuaskan semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, DPRD, LSM, Aktivis Lingkungan, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan terutama masyarakat sekitar daerah eksplorasi tambang.

Bahaya Luntarnya Kemandirian Lokal

Pembangunan manusia perlahan akan hilang bersamaan dengan hancurnya pemberdayaan, keadilan, produktivitas dan Kesinambungan. Inilah konsekuensi atas intervensi pemodal dalam pengelolaan tambang yang sangat menguatirkan kita semua sekaligus mencirikan implementasi kebijakan ala paham neoklasik. Keyakinan kuat yang muncul adalah bahwa liberalisasi pasar dengan pengurangan peran pemerintah dalam bidang ekonomi adalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah pembangunan nasional. Friedman, seorang tokoh pendukung aliran Neoklasik mempertegas hal tersebut (Skousen, 2006). Itulah usaha pertama Friedman dalam memperkenalkan pasar bebas, sekaligus sikap tegasnya untuk menolak intervensi berlebihan pemerintah dalam konsep pembangunan ekonomi, khususnya di negara ketiga.

Faktanya adalah, bahwa kegiatan eksplorasi tambang tengah berlangsung hingga saat ini. Keberadaannya hampir pasti akan mematikan kemandirian lokal pembangunan manusia sebagaimana juga terjadi di berbagai kawasan eksploratif lainnya di wilayah Indonesia. Kearifan lokal pemerintah

daerah yang kian punah melambungkan masa depan ekonomi yang prorakyat menjadi semakin terkikis hancur sementara intervensi pemodal (asing) seakan membawa angin surga bagi munculnya penjajahan model baru di era kapitalisme global.

Bahaya lunturnya pembangunan ekonomi rakyat merupakan pengkerdialan terhadap semangat pembangunan ekonomi lokal sebagai salah satu akibat ketidaksiapan pemerintah daerah dalam memprediksi masa depan (predict future). Hingga saat ini, tidak ada sedikitpun jaminan terciptanya kesejahteraan rakyat sebagai hasil investasi tambang. Justru yang akan terjadi adalah mematikan aspek pemberdayaan, hilangnya keadilan, rendahnya produktivitas dan tidak tercapainya pembangunan keberlanjutan. Keempat aspek tersebut dapat dijelaskan secara terperinci, yakni: pemberdayaan, keadilan, produktivitas, dan keberlanjutan.

Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia (SDM) lokal hanya akan diperdayakan, bekerja seperti mesin dan perlahan akan berkarat lalu dibuang. Bukankah itu yang terjadi di Freeport, Soroako, Kutai dan tempat-tempat lainnya di mana masyarakat asli sekitar kawasan tambang akan tetap menjadi korban? SDM lokal terpaksa pasrah tak berdaya seperti sapi perahan dan pada saatnya mati terasing di tanahnya sendiri. Pemabngunan ekonomi yang seharusnya merupakan partisipasi kolektif masyarakat justru berubah menjadi sebuah penjajahan modern.

Dimensi manusia dalam pembangunan ekonomi lokal dengan sendirinya berubah dan mengalami kemunduran drastis. Tujuan pembangunan dan pertumbuhan sosio ekonomi semestinya sejalan di mana pertumbuhan ekonomi itu sendiri harus seiring dengan peningkatan sumber daya manusia. Konsep pembangunan manusia dalam pembangunan yang diukur dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality Life Index*), sebagaimana dikutip oleh Hakim, Prasetyani & Sulistyo (2009) melalui indikator angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf semestinya dipertimbangkan terlebih dahulu. Akses terhadap indikator ini akan semakin buruk jika manusia sekali lagi tidak ditempatkan pada tempat yang utama dalam pembangunan ekonomi lokal.

Keadilan

Belum ada sejarah di mana masyarakat (lokal) menikmati buah keadilan sebagai kado yang datang dari pertambangan. Yang terjadi justru sebaliknya di mana eksploitasi besar-besaran akan terjadi dan sudah barang tentu sang investorlah yang mendapatkan keuntungan. Hasil tambang tidak akan pernah dinikmati secara merata dan sangat tidak signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat.

Khusus dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi, maka pemerintah seharusnya membuat suatu model atau format pembangunan yang menjunjung tinggi norma-norma keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat (*economic rights*). Terkait dengan aktivitas penambangan emas Batu Gosok, dalam menjalankan kebijakan ekonomi investasinya, Pemda Manggarai Barat terlihat jelas sangat tidak bijak dalam membuat keputusan yang kontradiksi dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Hak-hak rakyat terenggut oleh kepongahan pengambil kebijakan yang secara sepihak memutuskan dijalankannya proyek penambangan emas tersebut.

Produktivitas

Dalam konteks produktivitas, masyarakat adalah input dari produktivitas (sebagai tenaga kerja). Peningkatan pertumbuhan produktivitas ekonomi di kalangan masyarakat akan sangat sulit tercapai. Hal ini disebabkan oleh orientasi pembangunan yang keliru. Dalam teori klasik, menekankan

penyerapan tenaga kerja dalam satu sektor produksi akan terus dilakukan sampai tambahan produktivitas (*marginal productivity*) adalah nol. Jika diilustrasikan dengan sektor pertambangan, maka tambahan produktivitas hasil pertambangannya terus tumbuh maka potensi penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak. Selanjutnya, sebagai akibat penyerapan tenaga kerja yang banyak akan menimbulkan daya beli masyarakat menjadi tinggi. Idealnya adalah seperti demikian, namun hal itu sulit terjadi. Tambang bukanlah sektor primer dalam perencanaan pembangunan daerah Manggarai Barat. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut tidak sebanding jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sebut saja sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan jasa atau pariwisata.

Keberlanjutan

Kegiatan eksplorasi tambang pada akhirnya hanya menguntungkan pemerintah saat ini dan juga menguntungkan investor. Kesejahteraan masyarakat jauh dari harapan, sementara kemiskinan, kerusakan alam, polusi dan penyakit akan tetap menghantui masyarakat. Bekas tambang hanya akan menyisakan lahan tak berguna, luka perut bumi yang menganga dan areal bekas tambang yang tak mungkin produktif lagi. Dengan demikian ketika aktivitas penambangan telah menyelesaikan tahap eksploitasi, maka selanjutnya adalah menyaksikan sebuah pemandangan mengerikan, lahan yang sama sekali tidak bisa diproduksi dan ancaman penyakit dan kemiskinan yang terus mennggerogoti masyarakat sekitar kawasan.

Memang belum pernah ada eksploitasi tambang di daerah Manggarai sehingga mungkin hal tersebut dianggap berlebihan atau hanya bualan, tapi itulah fakta yang terjadi. Semua tahu, betapa besar potensi kekayaan alam yang bernilai ekonomi tinggi yang terkandung di dalam perut bumi Manggarai. Kalau hari ini masyarakat Manggarai masih bisa hidup bahkan pendapatan perkapita terus naik, ini semua berkat kekayaan sumber daya hasil pertanian, perkebunan, kelautan, hutan dan sumbangan sektor jasa pariwisata dan transportasi serta industri kreatif. Bagaimana dengan sektor tambang?

Tidak diragukan bahwa hasil tambang apalagi tambang emas mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kekayaan alam berupa kandungan emas dan jenis kekayaan lainnya yang dimiliki negeri ini telah banyak dieksploitasi dan sayangnya hasil alam tersebut lebih banyak menguntungkan investor / pemodal dibandingkan masuk kantong negara. Kalau demikian, berapa yang masuk ke kantong PAD? Gambaran suram pengelolaan tambang akan terus mengkristal dalam sistem kebijakan pemerintah terkait dengan sektor yang sangat rawan ini. Hal senada pun menimpa kita, namun demikian tuntutan yang bijak dan arif akan jauh lebih cermat dalam menghadapi hal ini. Ada dua hal yang perlu dilihat secara objektif mengenai economic impact dari pengelolaan (eksplorasi-eksploitasi) tambang emas Batu Gosok, yaitu dampak primer dan dampak sekunder.

Dampak Primer

Kontribusi Ekonomi

Saat ini, potensi utama yang paling berkontribusi terhadap PAD Manggarai Barat adalah: sektor pertanian (pertanian sektor pangan dan perdagangan); sektor perikanan dan kelautan; sektor kepariwisataan; sektor pertambangan; sektor kehutanan. Kondisi PAD Jabar 2004 adalah 1.5 Milyar, dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 18 Milyar. Pendapatan perkapita tahun 2004: 1.5 juta per kapita, dan pada tahun 2008 menjadi 3.5 juta. Secara Nasional: 9.5 juta per kapita, masih jauh. (Sumber : Dinas Perhub. & Informatika Jabar)-2009. Berdasarkan data tersebut, sangat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah PAD setiap tahunnya, demikian juga pendapatan perkapitanya. Bisa dikatakan bahwa peningkatan jumlah PAD yang terus meningkat secara signifikan dipengaruhi oleh sumbangan sektor-sektor andalan yang berasal dari kemandirian lokal perekonomian rakyat.

Pembangunan Sosial

Pembangunan senantiasa berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan masalah sosial dan lingkungan hidup. Namun persoalan yang seringkali terjadi sangat paradoks di mana kawasan sekitar pertambangan berubah menjadi kantong kemiskinan yang disebabkan oleh hilangnya sumber daya sehingga masyarakat tidak mungkin lagi menggantungkan kehidupannya pada lingkungan alam yang hilang dan terkontaminasi berbagai zat beracun dan partikel negatif lainnya dari aktivitas penambangan. Kemiskinan lain yang terjadi adalah hilangnya pendidikan akibat kemelaratan, ketimpangan sosial karena keuntungan tambang hanya dimonopoli oleh kaum konglomerat dan kroni-kroninya.

Dampak Sekunder

Dampak sekunder dilihat sebagai *multiplier effect* akibat aktivitas dan kontribusi penambangan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan infrastruktur, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan taraf hidup masyarakat, tingkat kebersihan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dan sebagainya.

Re-Orientasi Paradigma Pembangunan Ekonomi

Proses demokrasi di negeri ini sebenarnya masih dalam tahap ujian. Dalam perspektif demokrasi ekonomi, ujian yang terberat tentu saja melihat fakta bahwa masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah masih sangat banyak. Di saat pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dilaporkan mengalami peningkatan, fakta yang justru terjadi adalah masih dengan masyarakat yang menderita kelaparan. Kenikmatan ekonomi hanya milik sebagian masyarakat dan golongan tertentu. Bukankah di sini telah terjadi ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi juga terjadi pada masyarakat NTT umumnya termasuk masyarakat Manggarai Barat.

Persoalan-persoalan ini berawal dari adanya berbagai kebijakan pembangunan yang salah arah ditambah lagi dengan persoalan struktural. Kebijakan "absurd" eksplorasi tambang hanya salah satu contoh dari sekian banyak kebijakan timpang yang sudah dilakukan. Karena itu, maka sudah saatnya pemerintah melakukan reorientasi pembangunan yang memang harus sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Secara emosional, masyarakat NTT memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap sumber daya alam. Alam dan segala jenis kekayaannya telah dan akan terus memberi kehidupan. Meski kemiskinan menjajah hampir sebagian besar rumah tangga masyarakat Manggarai, namun mereka masih bisa bertahan hidup dan tak pernah merasa terhina karena kemiskinan tersebut. Hasil kekayaan alam baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan laut merupakan komoditas ekonomi rakyat yang sangat menentukan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi desentralistik harus disadari dan dipahami sebagai sebuah kebijakan ekonomi yang sangat tergantung pada kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Di sinilah peran pemerintah sangat diharapkan agar lebih bijak dan sadar terhadap potensi sumber daya yang seharusnya menjadi prioritas utama. Maka yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membangun fondasi ekonomi yang sangat fundamental sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan struktur kelembagaan masyarakat Manggarai. Fondasi ekonomi ini terletak pada sektor pertanian, perkebunan, hutan dan laut serta pariwisata.

Dalam mendukung reorientasi pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai Barat dan termasuk Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, beberapa hal pokok yang harus diperhatikan adalah:

Re-Desgin Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Ketiga faktor ini sangat sentral dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Jika pembangunan ekonomi dilandaskan pada faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kondisi alam Manggarai Barat, maka hasil pembangunan sudah pasti akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Mereka sendiri yang menginvestasikan sumber daya-sumber daya yang ada. Di sini, ekonomi kerakyatan adalah asas kunci pembangunan ekonomi yang sangat sesuai dengan kondisi yang ada. Demokrasi ekonomi dalam semangat ekonomi kerakyatan harus diletakan sebagai landasan pokok. Pemerintah dalam hal ini harus menjadi panutan dan teladan demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kaum pemodal. Dukungan faktor sumber daya manusi dan infrastruktur yang memadai tentu sangat dibutuhkan. Sekali lagi, ujiannya adalah menghilangkan ego sektoral para elit pemimpin dan secara bersama-sama memikirkan dan mengambil langkah solusi yang cermat.

Perbaikan pada sistem pengelolaan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi harus terus dilakukan. Demikianpun dalam hal pemberdayaan lulusan perguruan tinggi yang seharusnya di-manage agar dapat memberikan kontribusi pada setiap sektor pembangunan yang ada. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor infrastruktur. Patut disadari bahwa salah satu permasalahan pokok yang kerap menjadi hambatan pembangunan ekonomi daerah adalah kurangnya dukungan infrastruktur pembangunan. Akses ke infrastrukutr yang sangat terbatas ini menjadi semakin sulit diperbaiki apabila strategi pembangunan ekonomi tidak fokus. Seharusnya, apabila dilakukan secara fokus, maka pembangunan infrastruktur akan dengan sendirinya mengiringi program pembangunan yang dilaksanakan.

Mengoptimalkan Keunggulan Kompetitif Ekonomi

Keberadaan tambang Emas Batu Gosok adalah contoh kegagalan pemerintah daerah Manggarai Barat menempatkannya sebagai daya saing ekonomi. Dalam konteks kekinian, ini sama sakali tidak wajar dan tidak pantas. Tidak terlintas dalam rencana pembangunan daerah terkait investasi tambang. Anggap ini kekhilafan bupati yang berkuasa, Fidelis Pranda tapi yang sesungguhnya telah terjadi adalah kerusakan pada manajemen atau birokrasi dalam pengambilan keputusan.

Bappeda Manggarai Barat turut bertanggung jawab atas hal tersebut, artinya keputusan bupati terkait SK Ijin Tambang Batu Gosok bisa saja tidak terjadi jika Bappeda juga tegas dalam mengimplementasikan rencana dan kebijakan pembangunan daerah. Kembali ke konteks ekonomi kerakyatan dan kaitannya dengan komoditas unggulan dan sesuai penjabaran terdahulu maka saat ini, komoditas unggulan yang dimiliki Pemda Manggarai Barat adalah di Industri Primer dan Tersier khususnya pertanian, kehutanan, Jasa Transportasi dan Pariwisata. Khusus pariwisata, industri ini sangat booming, maka pekerjaan rumah (PR) selanjutnya adalah bagaimana membuat "*city branding*" Manggarai Barat dengan menjadikan Komodo sebagi Ikon yang sudah dikenal dunia. Tanpa mengesampingkan sektor agrikultur dan pertanian, sektor pariwisata adalah komoditas unggulan yang kini harus diperhatikan lebih serius. Komodo adalah objek yang harus menjadi haritege Manggarai dan NTT.

Membangun Daya Saing Global

Kuncinya adalah inovasi dan perubahan. Karena itu, Manggarai Barat sangat membutuhkan pemimpin yang visioner dan peka terhadap perubahan. Pemetaaan pembangunan dan masa depan Manggarai Barat hanya bisa dilakukan jika didukung oleh para pemimpin yang memiliki integritas, kecerdasan dan karakter yang sangat dibutuhkan di masa depan. Globalisasi tidak untuk dihindari, justru harus dilihat sebagai peluang untuk bisa bersaing dan memenangkan persaingan itu sendiri di masa depan.

Re-Thinking Investment

Tentu saja, kekurangan modal menjadi salah satu indikator rendahnya tingkat investasi di kabupaten Manggarai Barat. Tentu sulit mengharapkan investor lokal. Di sinilah seharusnya Pemda melalui badan koordinasi pembangunan daerah melakukan komunikasi bisnis untuk menjaring investor menanamkan modalnya pada industri-industri yang mensupport kemandirian ekonomi lokal dan menggerakkan iklim berbagai bidang usaha yang sesuai kondisi sumber daya daerah. Pemerintah harus menyiapkan langkah taktis dan strategis dalam rangka mendukung investasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan sarana pendukung lainnya.

Dalam konteks investasi tambang Batu Gosok, penilaian dan keyakinan saat ini dapat dikatakan sebagai proyek jangka pendek. Keuntungan terbesar dimonopoli oleh pemerintah yang berkuasa dan sang investor. Yang paling berkepentingan dan yang mendapatkan keuntungan tentu saja pemerintah yang sedang berkuasa dan juga pihak investor. Namun dampaknya adalah jangka panjang dan yang menjadi korban pertama dan terbesar adalah masyarakat sekitar kawasan penambangan. Ini sangat memprihatinkan. Berapa yang akan menjadi korban keganasan zat-zat beracun yang dihasilkan dari lubang besar perut bumi Batu Gosok? Berapa nilai kehancuran budi daya laut dan budi daya pariwisata Batu Gosok dan sekitarnya?

Maka dari itu, alangkah baiknya apabila pemerintah lebih fokus pada beberapa hal dalam rangka untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Beralih ke investasi pengembangan agrobisnis. Fokus pada sektor pertanian dan perkebunan yang memiliki potensi terbesar di kawasan Manggarai Barat. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada tanaman pangan, tetapi juga komoditas lainnya seperti palawija dan perkebunan. Pemanfaatan lahan-lahan lebih dimaksimalkan lagi dan melakukan program penyuluhan yang terus menerus dan pendampingan yang diberikan oleh para ahli di bidang agrobisnis. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuka jaringan dan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan dan pengelolaan investasi agrobisnis.

Industrialisasi pedesaan. Pembangunan selama ini terkonsentrasi di perkotaan dan sekitarnya. Salah satu alasannya adalah persoalan klasik, transportasi dan infrastruktur jalan yang tidak memadai. Sementara di sisi lain, pedesaan menyimpan banyak potensi yang sebenarnya bisa dikelola lebih maksimal. Petani dioptimalkan untuk mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berbudaya industri yang berorientasi pasar. Bentuknya adalah industri yang sesuai dengan UKM pertanian dan perkebunan. Hasil-hasil tanam mulai dikelola dengan menggunakan teknologi yang cocok sehingga mampu meningkatkan nilai dari produk tersebut.

Merangsang investor. Sasarannya adalah calon investor di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan. Tentu hal ini harus dibarengi dengan dukungan infrastruktur yang memadai seperti, transportasi, listrik, fasilitas perkreditan, dan terutama tenaga-tenaga ahli.

Menggali potensi dan prioritas untuk investasi berdasarkan komoditas yang dikembangkan, artinya pemerintah harus menerapkan strategi fokus dan berdasarkan kompetensi wilayah. Pemerintah sebaiknya membangun kemitraan dengan pihak investor atau swasta untuk membangun jaringan produksi, pemasaran dan distribusi hasil produksi.

Pembangunan Berkelanjutan dalam Globalisasi Ekonomi

Para pemimpin kelompok G-20 dalam sidang dua harinya di Pittsburg, Amerika Serikat (24 – 25 September 2009) telah menghasilkan komunike bersama. Salah satu tekad G-20 adalah berjuang bersama-sama membangun ekonomi global. Selanjutnya dalam komunike tersebut menunjukkan betapa penting menciptakan suatu era baru kegiatan ekonomi global yang berkelanjutan didasarkan pada tanggung jawab bersama. Kesimpulan yang diambil para pemimpin G-20 mengatakan suatu kebenaran dasar, yakni pertumbuhan dan kemakmuran hanya bisa terjadi jika setiap negara bisa bekerja sama dan saling membantu (Kompas. 27 September 2009).

Keberhasilan dasar yang diyakini oleh kelompok G-20 dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi daerah dalam terutama konteks ekonomi keberlanjutan (*sustainable economic*) dan sekaligus sebagai jawaban atas kritik yang diamanatkan kepada pemerintah daerah Manggarai Barat terkait polemik Tambang Emas Batu Gosok. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip Memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Brundtland Report dari PBB, 1987). Selanjutnya dikatakan bahwa salah satu faktor yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Bagaimana relevansi pemikiran yang dituangkan dalam komunikasi bersama Pemimpin G-20 terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan globalisasi ekonomi dengan realita pembangunan ekonomi serta strategi dan rencana pembangunan ekonomi daerah.

PENUTUP

Keberadaan tambang emas Batu Gosok jelas sudah menyimpang dari konsep pembangunan yang berkelanjutan karena aktivitas penambangan berada pada zona penyangga wisata sebagaimana hal penetapan kawasan ini dituangkan dalam pasal 23 Manggarai Barat No 30 Tahun 2005. Dengan demikian kegiatan tambang sudah pasti merusak keberadaan habitat yang berada dalam perlindungan dinas pariwisata Pemkab Manggarai Barat. Kenyataan yang sangat paradoks, sebab sektor pariwisata sendiri adalah salah satu kekuatan ekonomi yang dimiliki Pemda Manggarai Barat saat ini. Upaya yang harus dilakukan adalah mengkaji ulang keputusan ijin penambangan dengan mengacu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Pembangunan Ekonomi di negara-negara kelas tiga seperti halnya di Indonesia dalam menghadapi gempuran globalisasi ekonomi tidak dapat ditawar atau ditolak lagi. Persoalan utama adalah bagaimana pemerintah mengambil langkah yang bersifat positif dan membangun serta mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin. Demikian pun dalam pergerakan ekonomi lokal. Kegiatan ekonomi terkait proses dan hasil produksi, pola konsumsi masyarakat dan distribusi hasil-hasil produksi lambat laun akan mengikuti perubahan sesuai perkembangan global. Industrialisasi, akses teknologi informasi yang semakin intens serta pergerakan iklim investasi akan terus berkembang dan dalam waktu singkat, sumber daya lokal akan menjadi target utama dalam pergerakan sektor industri dan bisnis. Pemerintah daerah harus mengembangkan dan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif melalui peningkatan daya saing (*competitiveness*), dengan kata lain yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dari adanya globalisasi.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak bisa mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial. Keberadaan tambang emas Batu Gosok jelas telah menyeleweng dari hal ini, karena itu tidak ada bentuk alibi apapun untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ke depannya, pemerintah daerah dituntut lebih arif dan bijak dalam setiap bentuk pengambilan keputusan terutama yang bersifat strategis dan berdampak pada masa depan pembangunan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk protes atas kebijakan tambang ini justru karena adanya keberpihakan pada alasan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Sekali lagi, kesejahteraan ekonomi tidak bisa diperoleh dengan jalan pintas tanpa melihat berbagai aspek penting lainnya. Derivasi konsep pemikiran ekonomi dan politik pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma dan melakukan reorientasi yang tepat dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Tantangan terberatnya adalah bagaimana mentransformasi ideologi kapitalis ke dalam konsep pembangunan yang mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita semua bekerja untuk kebaikan Manggarai Barat dan demi masa depan bangsa kita terutama demi menyelamatkan Manggarai dari segala bentuk penjajahan modern dalam bentuk apapun. Kontribusi dalam bentuk apapun untuk menyelamatkan perekonomian daerah (Manggarai Barat) adalah tugas dan panggilan kita semua. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat terutama sebagai masukan bagi pemerintah daerah Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Crozier, M., Huntington, S. P., & Watanuki, J. (1975). *The crisis of democracy: Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University Press.
- Dahl, R. A. (1985). *A preface to economic democracy*, Berkeley: University of California Press.
- Hakim, L., Prasetyani, D., & Sulisty, H. (2009). *Visi perekonomian indonesia 2030*. Solo: BPEP UNS.
- Kadi, S. (2006). Menata ulang sistem demokrasi dan TNI menuju peradaban baru. Parrhesia.
- Klein, N. (2007). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. New York: Metropolitan Books
- Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sekretariat Negara.